

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi pada saat ini cukup berdampak besar bagi manusia untuk mempermudah dalam melaksanakan kehidupan, hal ini dikarenakan manusia bergantung terhadap mesin-mesin yang diciptakan manusia seperti komputer yang dapat menunjang kemudahan pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya dan ditambah dengan perangkat lunak yang terdapat didalamnya akan membantu pegawai agar lebih mengerjakan pekerjaan dengan cepat dan akurat.

Pekerjaan yang dibantu oleh teknologi juga bukan hanya mempercepat dalam mengerjakan suatu pekerjaan saja, melainkan dalam mencari informasi dapat bermamfaat sehingga pegawai dapat menggunakan waktu dengan efektif dan efisien. Berbagai kemudahan tersebut akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan tepat pada waktunya baik dikerjakan secara individual ataupun dengan organisasi.

Organisasi merupakan salah satu unsur pendukung pelaksanaan fungsi manajemen. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governanvce and Good Government*), pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kemampuan mengolah data dan informasi, serta menyalurkan informasi tersebut secara cepat. Sistem informasi di pemerintahan berfungsi untuk membantu kelancaran tugas yang menjadi unsur pendukung dalam pelaksanaan fungsi dari manajemen. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektifitas berbagai aspek pengelolaan informasi yang ditunjukkan oleh kecepatan dan ketepatan waktu memproses, serta ketelitian dan kebenaran (*validitas*) yang dihasilkan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang semakin cepat di era globalisasi sekarang ini. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memberikan konsekuensi bagi para pemimpin organisasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*) (Sadat,2019). Penggunaan sistem informasi manajemen kepegawaian berguna untuk memperkecil biaya, meningkatkan komunikasi dan mengurangi waktu untuk menyelesaikan aktivitas yang berhubungan dengan kepegawaian (Beadless, Lowery dan Johns,2005)

Revolusi industry 4.0 yang tengah dirasakan dan diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup populasi dan tatanan kehidupan di seluruh dunia dan diprediksi akan membuat perubahan sosial dan pergeseran segi bisnis dan pelayanan. Pemanfaatan pengolahan data merupakan faktor penting yang

melandasi terobosan-terobosan, kini data maupun informasi telah berevolusi menjadi senjata dalam memerangi persaingan di berbagai bidang bukan hanya sebagai faktor pelengkap saja. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah telah menetapkan kebijakan sistem *E-government* mencakup pengembangan sistem informasi manajemen di bidang Kepegawaian.

E-government di Indonesia telah diperkenalkan melalui instruksi presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 mengamanatkan setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun Rencana Strategis Pengembangan *E-government* di lingkungannya masing-masing. Sejalan dengan Pengembangan *E-government* dan perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin canggih di era globalisasi ini, teknologi informasi menggunakan komputer telah menyederhanakan tugas menganalisis data dalam manajemen sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Dalam proses pengembangan *E-government*, pemerintah melewati Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementrian Dalam Negeri menjelaskan bahwa untuk melahirkan pelayanan kepegawaian yang efisien, efektif, cepat dan akurat diperlukan suatu pedoman untuk pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Hal itu pula yang sedang dirasakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung Jawa Barat sehingga berinisiatif mengimplementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Dengan implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian diharapkan proses pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam lingkup pemerintahan dapat diatur dan dilaksanakan dengan optimal serta efisien untuk mewujudkan *good governance* yang memerlukan system yang mampu mengakomodir kebutuhan pelayanan yang cepat, tepat dan tidak berbelit termasuk dalam pelayanan dan penanganan sistem kepegawaian.

Input memberikan kemampuan untuk memasukkan personalia kedalam sistem, informasi pegawai, kebijakan dan prosedur SDM, serta informasi yang berkaitan dengan kepegawaian lainnya harus dimasukkan dari dokumen kedalam sistem. Selain itu, masukan atau input pendukung faktor lain, diantaranya adalah kualitas SDM, pelaksanaan atau pengelolaan, serta anggaran.

Proses memperbaharui, menambah data baru, dan menghilangkan data yang sudah tidak diperlukan pada database. Melalui proses maka dapat dipastikan apakah hasil dari pelaksana dan pengolah data menjadi informasi yang dapat

dimanfaatkan oleh penentu kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan dibidang kepegawaian.

Output fungsi sistem yang paling jelas adalah kemampuannya memproduksi keluaran sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini meliputi laporan khusus yang disediakan oleh sistem sebagai penghubung penting antara Sistem Informasi Manajemen dan pemakainya. Pengeluaran data dan informasi disini adalah memindahkan dari bagian sistem informasi manajemen ke bagian yang memerlukan terutama para pembuat kebijakan, sebagai pemakai informasi manajemen ke bagian yang memerlukan terutama para pembuat kebijakan, sebagai pemakai informasi atau istilah lain adalah penelusuran atau penyajian data untuk digunakan oleh setiap orang yang berhak dan perlu mengakses informasi dengan cara yang mudah dalam waktu yang singkat.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan suatu aplikasi perangkat lunak (*Software*) yang dipergunakan untuk mengolah data-data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dan menyeluruh. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda menyebutkan bahwa. "Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah suatu totalitas yang terpadu yang terdiri atas perangkat pengolahan meliputi, pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, bergantung, dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian."

Menurut Musanef (1996: 244), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah suatu tatanan bagi proses pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyajian data dan informasi yang diperlukan untuk menunjang administrasi dan manajemen yang berkaitan dengan pegawai. Menurut Peranita SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Pegawai) didefinisikan sebagai Sistem Informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. Maka dapat disimpulkan bahwa SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawai) adalah sistem informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Kepegawaian Kementrian Dalam Negeri Pasal 8 ayat 2 menjelaskan bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawain memerlukan jaringan atau dukungan infrastruktur yang diantaranya seperti perangkat keras (*Hard ware*), Perangkat jaringan (*Network dan LAN* dan Keamanan lalu lintas data atau *security* atau *HTTPS*).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung Jawa Barat merupakan instansi yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian, telah membuat dan mengembangkan *website* <https://bkpsdm.bandung.go.id/casn2022/> masyarakat maupun pegawai dapat mengakses alamat website tersebut melalui beberapa fasilitas yang disediakan BKPSDM, salah satunya yaitu

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) telah di terapkan BKPSDM Kota Bandung Jawa Barat dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian namun belum bisa dikatakan efektif karena masih ada beberapa masalah dalam penerapannya yaitu pada tahap *input* : terdapat keluhan pegawai terhadap pelayanan administrasi kepegawaian yang kurang efektifnya pengolahan data ,ketersediaan data pegawai yang dirasakan belum secara cepat,tepat,dan akurat dalam sistem informasi manajemen pegawai sehingga beberapa pegawai mengalami masalah dalam mengetahui data pegawai dan pengurusan administrasi kepegawaian.

Keterlambatan proses input pegawai ini dikarenakan dalam tahapannya data-data pegawai harus di *entry* terlebih dahulu oleh Sub Bidang Data lalu setelah itu data diarsipkan sehingga hal inilah yang memicu keterlambatan dalam proses input data pegawai.

Pada tahap proses: masih belum maksimalnya penggunaan sarana dan prasarana sehingga proses pendistribusian hasil olahan SIMPEG masih harus dilakukan secara manual dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam pengolahan data dan informasi kepegawaian dengan memanfaatkan SIMPEG. Dengan adanya masalah pada tahap *input* dan *proses* sehingga berpengaruh pada hasil *output* mengenai data dan informasi pegawai yang tidak dapat diakses dengan mudah dan dalam waktu yang singkat.

Sarana dan Prasarana di BKPSDM Kota Bandung Jawa Barat perlu ditingkatkan kembali dikarenakan apabila meninjau perangkat keras seperti komputer yang belum sesuai dengan spesifikasi dapat memperlambat proses Implementasi SIMPEG itu sendiri. Tidak hanya komputer yang harus diperhatikan, ada juga yang tidak kalah penting untuk diperhatikan yaitu konektivitas atau *network* yang menjadi permasalahan serius. Berdasarkan observasi yang peneliti dapatkan di BKPSDM Kota Bandung Jawa Barat peneliti menemukan temuan yang dimana *network* disana hanya ada satu saja.

Dengan kurangnya konektivitas untuk dapat mempercepat akses SIMPEG tentunya hal ini harus diperhatikan, karena ketika pemakaian koneksi internet yang terlalu banyak di berbagai *device* dapat memperlambat laju koneksi internet tersebut sehingga perlu ditambahkan juga di *upgrade* kapasitas MBPS didalam

Wifi tersebut agar dapat mempercepat proses input data-data pegawai dan juga keperluan hal lainnya terkait dengan SIMPEG di BKPSDM Kota Bandung.

Dengan adanya masalah tersebut maka pelaksanaan SIMPEG di BKPSDM Kota Bandung Jawa Barat belum terlaksana secara efektif sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu diperlukan, peningkatan dan pemantapan pengolaan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) merupakan sarana dalam penyajian data dan informasi kepegawaian sehubungan dengan semakin berkembangnya ruang lingkup serta beraneka ragam pengelolaan kepegawaian sesuai dengan tingkat perkembangan organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan di atas serta dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dengan melakukan penelitian yang berjudul **"Implementasi kebijakan sistem informasi manajemen kepegawaian di BKPSDM Kota Bandung Jawa Barat"**.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian di atas, agar masalah yang dibahas lebih spesifik sehingga dapat memunculkan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka fokus penelitian yang akan dikaji yaitu tentang implementasi kebijakan sistem informasi manajemen melalui pendekatan dimensinya dalam sistem informasi manajemen kepegawaian di BKPSDM kota Bandung Jawa Barat.

Adapun fokus penelitian berdasarkan teori Edward III yaitu:

1. Komunikasi
2. Struktur Birokrasi
3. Disposisi
4. Sumber Daya

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, agar masalah yang dibahas lebih spesifik sehingga dapat memunculkan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka fokus penelitian yang akan dikaji yaitu tentang implementasi kebijakan sistem informasi manajemen melalui pendekatan dimensinya dalam sistem informasi manajemen kepegawaian di BKPSDM kota Bandung Jawa Barat. Dari fokus tersebut dirumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Implementasi *SIMPEG* pada tahap input di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Bandung Jawa Barat?
2. Apa saja hambatan dalam Implementasi *SIMPEG* di Kota Bandung Jawa Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi *SIMPEG* pada tahap input di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Bandung Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam Implementasi *SIMPEG* di Kota Bandung Jawa Barat.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis, kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu medium kontribusi terhadap teori dan konsep Ilmu Administrasi Publik khususnya pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 2) Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dorongan serta pertimbangan alternatif terhadap urgensi pemecahan masalah Pengembangan Sumber Daya Manusia di BPKSDM